

KEEFEKTIFAN PELAKSANAAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SMA/SMK SEDERAJAT

Nazila Qonieta Rahmawati Al Hilmi¹, Muhtar², dan Binti Muchsini³*

*Pendidikan Akuntansi, FKIP, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Surakarta

E-mail: nazilaqonieta@gmail.com

Abstract

This research aims to know the effectiveness of the good governance principle on activity plan and school budgeting senior/vocational high school preparation in Pacitan. This research is based on the agency theory of Jensen and Meckling (1976) using a descriptive quantitative method. The Independent variable in this research is good governance principles and the dependent variable is activity plan and school budgeting. This research using questionnaires as a data collector. Respondents in this research are divided into two categories that are responsible directly to the activity plan and school budgeting including the school committee, the school principal, and the school treasurer and the irresponsible are to directly on activity plan and school budgeting of them teachers and students with the whole sixty respondents. The validity test data in this research uses reproducibility coefficient test and scalability coefficient test meanwhile, data reliability uses Cronbach's Alpha coefficient test. This research uses techniques description statistics and the requirements analysis test. The conclusion of this research suggests that the performance of good governance principle on activity plan and school budgeting senior/vocational high school preparation in Pacitan is categorized as effective. It is proven with a percentage of the efficient percentage acquired at 92.58%.

Keywords: *agency theory, good governance, and activity plan, and school budgeting.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini berlandaskan teori keagenan dari Jensen & Meckling (1976) dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *good governance* sedangkan variabel terikat adalah RKAS. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap RKAS diantaranya komite sekolah, kepala sekolah dan bendahara sekolah dan pihak yang tidak bertanggungjawab secara langsung terhadap RKAS diantaranya guru dan wali murid dengan jumlah keseluruhan enam puluh responden. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien reproduibilitas dan uji koefisien skalabilitas sedangkan uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan uji koefisien *Cronbach's Alpha*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan uji prasyarat analisis. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan dikategorikan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase keefektifan yang diperoleh mencapai rata-rata 92,58%.

Kata Kunci: teori keagenan, *good governance*, dan RKAS.

PENDAHULUAN

Pergantian tahun 2020 menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat untuk perbaikan Indonesia pada dunia pendidikan. Akhir tahun 2019 silam berhasil mencatat tumpukan harapan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, berupa pemberitahuan program Merdeka Belajar dan rencana membuat *Blueprint* Pendidikan Indonesia. Menurut pemerhati dan praktisi pendidikan, Indra Charismiadji (Harususilo, 2020), terdapat tiga catatan penting yang perlu diperhatikan mengenai arah pembangunan pendidikan di Indonesia. Tiga catatan tersebut diantaranya pengakuan kondisi pendidikan Indonesia, cetak biru pendidikan Indonesia dan tata kelola dan kualitas guru.

Adanya tiga catatan pendidikan tersebut membuat pemerintah Indonesia senantiasa meningkatkan pendidikan dari berbagai sisi termasuk sisi pembiayaan. Berdasarkan informasi yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020), anggaran pendidikan Indonesia untuk tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,2% dari *outlook* tahun 2019 sebesar 478,4 triliun rupiah menjadi 508,1 triliun rupiah atau sama dengan peningkatan sebesar 29,7 triliun rupiah. Dengan meningkatnya anggaran yang tidak sedikit tentu saja memunculkan banyak pertanyaan bagi masyarakat mengenai penggunaan alokasi dana tersebut. Sebagian besar alokasi anggaran pendidikan tahun 2020 dialokasikan untuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu 12,3% dari anggaran

atau sebesar 64 triliun.

Adanya APBN pendidikan yang diberikan kepada sekolah, membuat pemerintah memiliki hak untuk selalu mengontrol dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Di sisi lain menurut Trisnawati (2018), sekolah memiliki model otonomi pendidikannya sendiri dalam penyelenggaraan pendidikan yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal tersebut sejalan dengan *agency theory* yang mendeskripsikan mengenai adanya dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Konsep dasar teori keagenan dalam pemeritahan yaitu prinsipal diperankan oleh legislatif dan publik sedangkan agen diperankan oleh eksekutif (Sutaryo, Naviantia & Muhtar, 2020).

Teori keagenan menggambarkan keterikatan prinsipal dan agen dalam bentuk kesepakatan yang memberikan wewenang kepada prinsipal untuk memerintah agen melakukan jasa atas nama prinsipal dan membuat keputusan terbaik bagi prinsipal (Ardika & Wirakusuma, 2016). Dalam organisasi layanan pendidikan, pemerintah dan wali murid (sumber dana) yang berperan sebagai prinsipal juga memiliki kesepakatan dengan pengelola sekolah yang berperan sebagai agen. Adanya kesepakatan tersebut membuat tindakan agen terkadang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga muncul konflik keagenan dan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi apabila pengelola sekolah tidak menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan kepada pemerintah maupun wali murid. Asimetri informasi menjadi salah satu masalah yang sering muncul dalam pengel-

olaan organisasi terutama dalam pengelolaan keuangan. Asimetri informasi dapat diminimalisir dengan memperbaiki perencanaan kegiatan maupun anggaran dalam pendidikan sesuai standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah (Raharjo, 2007).

Perencanaan yang ada di sekolah atau madrasah disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Menurut Kemendikbud (Hutasuhut, 2017), perencanaan pendidikan yang paling baik untuk diterapkan adalah perencanaan jangka pendek karena perencanaan jangka pendek sudah spesifik, relatif eksak dan dipastikan akan terrealisasi. Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan yang disusun untuk satu sampai empat tahun ke depan. RKAS merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. Salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan nasional yaitu dengan adanya Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RKAS yang disusun dengan baik dan benar sesuai dengan standar pembiayaan nasional (Abimuda, 2020). Dalam pencapaian mutu tersebut, sekolah atau madrasah dituntut oleh pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Penyusunan RKAS dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Sekolah (TPRKS) yang dibentuk oleh kepala sekolah bersama komite sekolah dengan anggota minimal enam orang yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan perwakilan komite sekolah (Muhaimin, Suti'ah & Prabowo, 2012). Menurut Nugraha (2019), penyusunan RKAS harus dis-

esuaikan dengan lima indikator antara lain:

1. Menggunakan strategi analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun.
2. Rencana dan program sekolah mengacu pada hasil analisis SWOT.
3. RKAS berisi penjabaran dari Rencana Kerja Sekolah (RKS).
4. Program yang direncanakan bersifat operasional.
5. Tujuan RKAS setiap tahun saling berkaitan.

Dalam penyusunan RKAS sangat dibutuhkan prinsip yang dijadikan sebagai acuan keberlangsungannya. Prinsip tersebut disebut dengan prinsip *good governance*. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), *good governance* adalah gabungan beberapa kegiatan bernilai positif yang dilakukan oleh negara, swasta dan publik (Sabandar, Tawe & Musa, 2018). Istilah *good governance* telah dirintis sejak dimulainya era reformasi di Indonesia dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan Indonesia dengan mengedepankan demokrasi yang bersih (BPKP, 2017). *Good governance* menjadi salah satu alat reformasi yang dianggap dapat mewujudkan demokrasi yang bersih dan bersifat mutlak. Penerapan *good governance* yang selama ini dibanggakan, faktanya masih belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sampai saat ini masih banyak ditemukan kasus kecurangan dan kebocoran dalam penyusunan, pengelolaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan akibat kurang maksimalnya pelaksanaan prinsip *good governance* (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Selain itu, terjadinya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diidentifikasi sebagai salah satu alasan

kurang berhasilnya penerapan *good governance* pada suatu lembaga (Ramadhan, 2016).

Maka dari itu, perlu ditegaskan pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap RKAS dengan menerapkan sembilan indikator *good governance* menurut UNDP (Mahardhika, 2018) antara lain *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability* dan *strategic vision*.

Pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan RKAS adalah agar segala bentuk kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan oleh sekolah dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* mengharuskan pihak sekolah untuk melampirkan dokumen pendukung dalam laporan pertanggungjawaban (Darno & Sulistyowati, 2019).

Pernyataan di atas telah menunjukkan betapa pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan, pelaksanaan maupun pelaporan RKAS mengingat masalah utama yang sering terjadi adalah asimetri informasi antara pengelola sekolah dengan pemerintah dan wali murid. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif dengan mengeksplorasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian yang diteliti. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel *good governance* dan variabel RKAS.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi melalui kuesioner. Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan uji koefisien reproduibilitas dengan hasil 0,91 dan uji koefisien skalabilitas dengan hasil 0,81. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji koefisien *Cronbach's Alpha* dengan hasil 0,88. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan *software Microsoft Excel Program Analisis Skala Guttman-SKALO Versi 3*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data statistik deskriptif dengan bantuan *software SPSS Version 16.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan diisi secara langsung oleh responden, yaitu sebanyak 60 orang dari 12 SMA/SMK sederajat yang mewakili Kabupaten Pacitan. Hasil analisis deskriptif yang diperoleh tersebut disajikan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Sum	Mean	SD	Var.
<i>Good Governance</i> (X)	60	36	40	2.320	37,67	1,16	1,345
RKAS (Y)	60	7	11	562	9,37	1,23	1,524

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Variabel Good Governance

Hasil analisis deskriptif variabel *good governance* secara ringkas terdapat dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi *Good Governance*

Skor	Frekuensi	Persentase
36	2	3,3%
37	8	13,3%
38	17	28,3%
39	14	23,3%
40	19	31,7%
Total	60	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi data *good governance* dengan frekuensi tertinggi yaitu dengan skor jawaban 40 dengan persentase 31,7%. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui distribusi kecenderungan skor variabel *good governance* sebagai berikut.

Tabel 3. Kecenderungan Skor Variabel *Good Governance*

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	≥ 38,83	33	55%	Tinggi
2.	36,52 – 38,82	25	41,7%	Sedang
3.	< 36,51	2	3,3%	Rendah
Total		60	100%	

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Hasil kategori kecenderungan skor variabel *good governance* di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* di SMA/SMK sederajat Kabupaten Pacitan berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 55%. Hal tersebut berarti bahwa SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan telah melaksanakan prinsip *good governance* dengan sangat baik sesuai dengan sembilan indikator. Analisis setiap indikator *good governance* dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Persentase Ketercapaian Indikator

Good Governance

No.	Indikator	Persentase Ketercapaian
1.	<i>Participation</i>	92,50%
2.	<i>Rule of Law</i>	90,33%
3.	<i>Transparency</i>	95,83%
4.	<i>Responsiveness</i>	99,58%
5.	<i>Consensus Orientation</i>	98,33%
6.	<i>Equity</i>	96,67%
7.	<i>Efficiency and Effectiveness</i>	98,75%
8.	<i>Accountability</i>	99,17%
9.	<i>Strategic Vision</i>	99,17%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa setiap indikator memiliki peran masing-masing dalam upaya pelaksanaan prinsip *good governance*. Terdapat satu indikator yang paling dominan dalam pencapaian *good governance* yaitu *responsiveness* dengan persentase pencapaian sebesar 99,58%. Hasil tabel di atas, menunjukkan bahwa SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan telah mengupayakan pelaksanaan *good governance* dengan baik.

Variabel RKAS

Hasil analisis deskriptif variabel prinsip *good governance* secara ringkas terdapat dalam tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi RKAS

Skor	Frekuensi	Persentase
7	5	8,3%
8	10	16,7%
9	16	26,7%
10	16	26,7%
11	13	21,6%
Total	60	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa distribusi data RKAS dengan frekuensi tertinggi yaitu dengan skor jawaban 9 dan 10 dengan persentase 26,7%. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui distribusi kecenderungan skor variabel RKAS sebagai berikut.

Tabel 6. Kecenderungan Skor Variabel RKAS

No.	Rentang Skor	Frekuensi	Persentase	Kategori
1.	≥ 10,6	13	21,7%	Tinggi
2.	8,15 – 10,5	32	53,3%	Sedang
3.	< 8,14	15	25%	Rendah
Total		60	100%	

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Kategori kecenderungan skor variabel RKAS di atas menunjukkan penyusunan RKAS di SMA/SMK sederajat Kabupaten Pacitan sesuai dengan indikator yaitu berada pada kategori sedang yaitu sebesar 53,3%. Kategori sedang yang diperoleh di atas dapat diartikan bahwa dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan masih ada beberapa indikator yang belum dilaksanakan secara maksimal. Analisis setiap indikator RKAS dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Persentase Ketercapaian Indikator RKAS

No.	Indikator	Persentase Ketercapaian
1.	Menggunakan strategi analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun.	69,17%
2.	Rencana dan program sekolah mengacu pada hasil analisis SWOT.	72,50%
3.	RKAS berisi penjabaran dari RKS.	85,00%
4.	Program yang direncanakan bersifat operasional.	99,17%
5.	Tujuan RKAS setiap tahun saling berkaitan.	100%

(Sumber: Data Primer yang Diolah, 2020)

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa sekolah telah berupaya menyesuaikan penyusunan RKAS dengan lima indikator yang telah ditentukan. Terdapat satu indikator yang paling dominan dalam pencapaian indikator RKAS yaitu tujuan RKAS setiap tahun saling berkaitan dengan persentase pencapaian sebesar 100%. Hasil ketercapaian indikator pada tabel di

atas, menunjukkan bahwa SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan telah melakukan penyusunan RKAS dengan baik.

Pembahasan

Pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan secara rinci dipaparkan menurut sembilan indikator di bawah ini.

1. Participation

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *participation* terhadap 12 sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 92,50% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden sudah terlibat dalam pengambilan keputusan anggaran dana sekolah secara konsensus. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan membentuk tim khusus yang terdiri dari komite, kepala sekolah dan bendahara sekolah yang terlibat dalam penyusunan RKAS. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *participation*. Apabila responden sudah terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap RKAS, maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan negara atau organisasi dan telah memenuhi prinsip *participation* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *participation* memberikan hak kepada *stakeholders* untuk turut berperan dalam penyusunan RKAS di sekolah.

2. Rule of Law

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *rule of law* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 90,33% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menjamin adanya kepastian hukum di sekolah dan keadilan dari penerapan hukum tanpa pandang bulu. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan RKAS telah disusun sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diikuti kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang tegas dari sekolah sehingga *stakeholders* memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu mematuhi kebijakan dan prosedur sekolah sesuai dengan yang telah ditetapkan sekolah. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *rule of law*. Apabila responden sudah menjamin adanya penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, maka dapat disimpulkan bahwa responden telah memiliki kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan dan telah memenuhi prinsip *rule of law* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *rule of law* memberikan jaminan bahwa sekolah telah membuat peraturan tegas dan memberlakukan sanksi atas pelanggaran yang terjadi dalam upaya menegakkan hukum seperti imbauan pemerintah.

3. Transparency

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *transparency* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 95,83%

dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden telah menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan menjamin ketersediaan informasi yang dibutuhkan *stakeholders* mengenai RKAS secara lengkap. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *transparency*. Apabila *stakeholders* telah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah menyediakan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh *stakeholders* di setiap waktu serta telah memenuhi prinsip *transparency* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *transparency* memberikan hak kepada *stakeholders* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut membuat *stakeholders* selalu mendapatkan informasi secara berkala mengenai pengelolaan keuangan sekolah.

4. Responsiveness

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada indikator *responsiveness* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 99,58% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden telah menjamin pelayanan informasi dan pengaduan kepada *stakeholders* sesegera mungkin untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam

pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan memiliki sistem administrasi yang jelas dan menyediakan layanan informasi dan pengadaan yang cepat, tanggap dan mudah diakses oleh *stakeholders* sepanjang waktu. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan indikator *responsiveness*. Apabila *stakeholders* telah mendapatkan pelayanan yang cepat dan tanggap dari sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah memiliki standar dan prosedur yang jelas dalam menjamin pelayanan informasi dan pengadaan yang dibutuhkan *stakeholders* serta telah memenuhi indikator *responsiveness* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan indikator *responsiveness* membuat sekolah selalu terbuka dengan masukan, kritikan maupun pengadaan yang disampaikan oleh wali murid dan menangani masalah secara cepat dan tanggap.

5. *Consensus Orientation*

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *consensus orientation* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 98,33% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden telah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan pengambilan keputusan tentang RKAS dan kebijakannya di SMA/SMK sederajat Kabupaten Pacitan melibatkan perwakilan wali murid dan disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan sekolah selama satu

tahun ajaran. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *consensus orientation*. Apabila responden mendapatkan hak untuk berpendapat dan berkumpul, maka disimpulkan bahwa sekolah telah mencapai kepentingan bersama dan memenuhi prinsip *consensus orientation* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *consensus orientation* menjamin sekolah untuk menyusun RKAS sesuai dengan kegiatan sekolah dan kebutuhan siswa. Selain itu, sekolah juga memberikan hak berkumpul, berbicara dan berpendapat kepada *stakeholders* dengan menyelenggarakan rapat pleno komite rutin setiap awal tahun ajaran baru.

6. *Equity*

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *equity* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 96,67% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan konsep keadilan dan kesamarataan dengan memberikan perlakuan dan fasilitas yang sama kepada *stakeholders* dan siswa. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan memberikan perlakuan yang sama kepada siswa dan *stakeholders* dalam setiap kegiatan, memberlakukan iuran sekolah secara merata kepada semua wali murid dan memberikan hak beasiswa kepada siswa dengan kriteria tertentu. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *equity*. Apabila sekolah menyamaratakan posisi *stakeholders*

dan siswa, maka disimpulkan bahwa sekolah telah menerapkan konsep keadilan dan kesamarataan dalam kondisi tertentu serta telah memenuhi prinsip *equity* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *equity* mengharuskan sekolah untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua *stakeholders* dan siswa dalam setiap kegiatan sekolah. Dalam pelaksanaan prinsip *equity*, sekolah juga harus memastikan bahwa informasi yang dimiliki mengenai siswa dan wali murid benar sehingga beasiswa yang diberikan tepat sasaran.

7. *Efficiency and Effectiveness*

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *efficiency and effectiveness* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 98,75% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan memiliki daftar prioritas kebutuhan dan kegiatan berdasarkan nilai manfaat sehingga memudahkan sekolah dalam merealisasikan dan melaksanakannya. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *efficiency and effectiveness*. Apabila sekolah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah telah menggunakan sumber daya secara bijak, optimal dan tepat sasaran sesuai kegiatan dan kebutuhan serta telah memenuhi prinsip *efficiency and effectiveness* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip

efficiency and effectiveness membuat sekolah melakukan pengelolaan atas dana yang diperoleh dengan bijak sesuai dengan yang tercantum dalam RKAS.

8. *Accountability*

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *accountability* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 99,17% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah mempertanggung-jawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan secara berkala telah menyelenggarakan rapat pleno komite atau pertemuan semacamnya untuk menyampaikan laporan realisasi keuangan sekolah periode sebelumnya dan memaparkan RKAS untuk periode selanjutnya. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *accountability*. Apabila sekolah telah menyesuaikan perencanaan dengan pelaksanaan disertai bukti pendukung dan memberikan sanksi atas kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah telah melakukan pertanggung-jawaban publik dengan menyampaikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan setiap kegiatan serta telah memenuhi prinsip *accountability* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *accountability* mewajibkan sekolah melakukan pertanggung-jawaban atas dana yang telah digunakan

dengan menyusun laporan realisasi dana yang kemudian disampaikan kepada pihak pemberi dana yaitu pemerintah dan wali murid. Laporan realisasi dana sekolah juga dilaporkan kepada pemerintah secara rutin setiap tahun. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan atas pengelolaan dana sekolah dengan dibantu komite sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua belas sekolah di Kabupaten Pacitan yang diteliti telah melaksanakan prinsip *accountability* dengan menerapkan empat indikator di dalamnya.

9. Strategic Vision

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada prinsip *strategic vision* terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 99,17% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki visi dan misi yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan SMA/SMK di Kabupaten Pacitan telah menyusun RKAS untuk jangka panjang, menengah dan pendek yang disesuaikan dengan visi misi sekolah. Adapun pendapat dari responden tersebut sesuai dengan prinsip *strategic vision*. Apabila sekolah memiliki perencanaan kedepan berdasarkan visi, misi dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dengan dukungan *stakeholders*, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah telah memiliki kejelasan terhadap setiap tujuan, kebijakan, peraturan

dan pelaksanaan kegiatan sekolah serta telah memenuhi prinsip *strategic vision* (BAPPENAS, 2007). Pelaksanaan prinsip *strategic vision* membuat sekolah harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dalam jangka pendek yang disesuaikan dengan visi dan misi sekolah.

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS yang disesuaikan dengan sembilan indikator yang ditentukan, diperoleh persentase rata-rata ketercapaian sebesar 96,70%. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa hasil ketercapaian pelaksanaan *good governance* menunjukkan hasil yang baik. Pembahasan mengenai penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan secara rinci dipaparkan menurut lima indikator di bawah ini.

1. Menggunakan strategi analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 69,17% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan analisis SWOT (*strenght, weakness, oportunity dan treat*) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kegiatan sekolah setiap tahunnya. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan sekolah terkait telah membuat daftar skala prioritas mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar siswa. Penerapan indikator ini membuat sekolah harus selalu melakukan

identifikasi kebutuhan dan kegiatan sekolah secara berkala.

2. Rencana dan program sekolah mengacu pada hasil analisis SWOT

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 72,50% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKAS, sekolah telah menyesuaikan dengan analisis SWOT (*strenght, weakness, opurtunity* dan *treat*) yang sebelumnya dilakukan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan penyusunan RKAS di sekolah terkait telah disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan sekolah selama satu tahun periode. Penerapan indikator ini membuat sekolah harus selalu memastikan bahwa anggaran yang telah disusun akan direalisasikan sebagaimana yang tercantum dalam RKAS.

3. RKAS berisi penjabaran dari Rencana Kerja Sekolah (RKS)

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 85,00% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa RKAS yang disusun sekolah berisi penjabaran dari RKS. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan sekolah menyusun RKAS secara rinci setiap tahunnya dengan memaparkan sumber dana dan pembelanjaan dana. Penerapan indikator ini mengharuskan

sekolah menyusun RKAS secara detail untuk disampaikan kepada *stakeholders* dengan tujuan transparansi.

4. Program yang direncanakan bersifat operasional

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 99,17% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa program-program yang diselenggarakan sekolah bersifat operasional yaitu sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan RKAS yang disusun bersifat operasional dan bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana belajar. Penerapan indikator ini mengharuskan sekolah untuk menyusun RKAS sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

5. Tujuan RKAS setiap tahun saling berkaitan

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner pada indikator ini terhadap dua belas sekolah, diperoleh rata-rata sebesar 100% dari keseluruhan responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan penyusunan hingga realisasi RKAS setiap tahunnya memiliki tujuan yang saling berkaitan. Pernyataan tersebut diperoleh berdasarkan jawaban atas kuesioner yang diisi oleh responden dengan jawaban setuju dalam pernyataan tujuan RKAS saling berkaitan setiap tahunnya disesuaikan dengan visi misi sekolah. Penerapan indikator ini membuat sekolah harus memastikan bahwa tujuan penyusunan RKAS bersifat *continues*.

Berdasarkan pembahasan mengenai penyusunan RKAS sesuai dengan lima indikator yang ditentukan, diperoleh persentase rata-rata ketercapaian sebesar 85,17%. Hal tersebut telah menunjukkan hasil yang baik. Uraian pembahasan di atas telah menjelaskan mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap penyusunan RKAS dan telah menunjukkan hasil yang baik dibuktikan dengan diperolehnya rata-rata persentase hasil kuesioner dari keseluruhan indikator di dua belas sekolah yaitu sebesar 92,58%. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan sekolah kepada pemerintah, wali murid dan *stakeholders* yang lain untuk meminimalisir tindakan oportunistik akibat asimetri informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati (2018) yang menunjukkan pengaruh signifikan atas penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga didukung hasil penelitian Rohman & Hanafi (2019) dan Kadir (2019) yang mengatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* dapat meningkatkan manajemen dan pelayanan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap RKAS berpengaruh dalam meningkatkan manajemen, pelayanan dan pengelolaan keuangan sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan dikategorikan efektif. Persentase keefektifan yang diperoleh mencapai rata-rata 92,58%. Artinya pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS sudah sesuai dengan 14 indikator dari masing-masing variabel yang ditentukan. Sedangkan persentase ketidakefektifan dari pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS secara keseluruhan mencapai rata-rata 7,42%.

Terdapat dua indikator yang dikategorikan tidak efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh. Indikator tersebut adalah indikator menggunakan strategi analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun dan indikator rencana dan program sekolah mengacu pada hasil analisis SWOT pada variabel RKAS dengan masing-masing persentase ketidakefektifan sebesar 30,83% dan 27,50%.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami peneliti dan diharapkan akan lebih diperhatikan oleh peneliti-peneliti yang akan datang. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Indikator transparansi yang dilaksanakan oleh sekolah memiliki keterbatasan yaitu sekolah hanya menjamin ketersediaan informasi untuk *stakeholders* dan tidak diperkenankan untuk umum.
2. Peneliti tidak diperlihatkan dokumen RKAS, laporan realisasi dana maupun petunjuk

Berdasarkan pembahasan mengenai penyusunan RKAS sesuai dengan lima indikator yang ditentukan, diperoleh persentase rata-rata ketercapaian sebesar 85,17%. Hal tersebut telah menunjukkan hasil yang baik. Uraian pembahasan di atas telah menjelaskan mengenai pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap penyusunan RKAS dan telah menunjukkan hasil yang baik dibuktikan dengan diperolehnya rata-rata persentase hasil kuesioner dari keseluruhan indikator di dua belas sekolah yaitu sebesar 92,58%. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan sekolah kepada pemerintah, wali murid dan *stakeholders* yang lain untuk meminimalisir tindakan oportunistik akibat asimetri informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati (2018) yang menunjukkan pengaruh signifikan atas penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga didukung hasil penelitian Rohman & Hanafi (2019) dan Kadir (2019) yang mengatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* dapat meningkatkan manajemen dan pelayanan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian relevan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap RKAS berpengaruh dalam meningkatkan manajemen, pelayanan dan pengelolaan keuangan sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS SMA/SMK sederajat di Kabupaten Pacitan dikategorikan efektif. Persentase keefektifan yang diperoleh mencapai rata-rata 92,58%. Artinya pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS sudah sesuai dengan 14 indikator dari masing-masing variabel yang ditentukan. Sedangkan persentase ketidakefektifan dari pelaksanaan prinsip *good governance* dalam penyusunan RKAS secara keseluruhan mencapai rata-rata 7,42%.

Terdapat dua indikator yang dikategorikan tidak efektif dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil data penelitian yang diperoleh. Indikator tersebut adalah indikator menggunakan strategi analisis SWOT yang dilakukan setiap tahun dan indikator rencana dan program sekolah mengacu pada hasil analisis SWOT pada variabel RKAS dengan masing-masing persentase ketidakefektifan sebesar 30,83% dan 27,50%.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dialami peneliti dan diharapkan akan lebih diperhatikan oleh peneliti-peneliti yang akan datang. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Indikator transparansi yang dilaksanakan oleh sekolah memiliki keterbatasan yaitu sekolah hanya menjamin ketersediaan informasi untuk *stakeholders* dan tidak diperkenankan untuk umum.
2. Peneliti tidak diperlihatkan dokumen RKAS, laporan realisasi dana maupun petunjuk

teknisnya oleh sekolah untuk melengkapi dan mendukung data hasil kuesioner yang disajikan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang diberikan sebagai berikut.

Bagi Komite Sekolah

Komite sekolah diharapkan selalu mendampingi dan mengawasi sekolah dalam setiap kegiatan terutama pengelolaan keuangan sekolah sehingga pelaksanaan prinsip *good governance* terhadap RKAS akan semakin meningkat dan terjamin.

Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharapkan lebih tegas dalam memberlakukan peringatan maupun sanksi kepada siswa yang terlambat membayar sumbangan sebagai salah satu bentuk dari implementasi indikator *rule of law*, sehingga siswa akan lebih tertib membayar iuran sekolah tepat waktu.

Bagi Wali Murid

Wali murid diharapkan lebih mencermati setiap komponen RKAS yang telah disampaikan oleh sekolah dan lebih kritis dalam menyampaikan pendapat pada rapat pleno komite untuk memaksimalkan pengimplementasian indikator *transparency*.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas kriteria pengukuran kuesioner dalam pengumpulan data sehingga diperoleh jawaban yang lebih variatif dan spesifik.

Abimuda. (2020). *Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) Dan Rancangan Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS)*. Diperoleh 28 April 2020 dari <https://www.abimuda.com/tujuan-penyusunan-rencana-kerja-sekolah/>.

Alfaruqi, I. & Kristanti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199-210.

Ardika, I.G.S. & Wirakusuma, M.G. (2016). Pengaruh Pendidikan, Fee, Komitmen dan Tekanan Waktu Pada Kinerja Auditor Kantor Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 1-16.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Buleleng. (2017, Mei 22). *Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia*. Diperoleh 2 April 2020 dari <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>.

Darno & Sulistyowati, I. (2019). Pengaruh Rencana Dan Realisasi Penggunaan Dana Bos Terhadap Kinerja Keuangan Di SMA Al-Islam Krian Sidoarjo. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 146-157.

Harususilo, Y.E. (2020, 1 Januari). Indra Charismiadji: 3 Catatan Penting Dunia Pendidikan Tahun 2020 (1). *Kompas*. Diperoleh 10 Maret 2020 dari <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/01/14203891/indra-charismiadji-3-catatan-penting-dunia-pendidikan-tahun-2020-1?page=all>.

Hutasuhut, R. (2017, 14 Maret). DPR: Blueprint Pendidikan Nasional. *Kompasiana*. Diperoleh 10 Maret 2020 dari <https://www.kompasiana.com/ronalduhasuhut/58c71ec184afbd314a04279b/dpr-blueprint-pendidikan-nasional>.

Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Jour-*

DAFTAR PUSTAKA

nal of Financial Economics, 3(4), 305-360.

Kementerian Keuangan. (2020). *Anggaran Pendidikan APBN 2020 (Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia)*. Diperoleh 10 Maret 2020 dari <https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/>.

Kementerian PPN/BAPPENAS. (2007). *Indikator Governance dan Penerapannya Dalam Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia*. Diperoleh 18 Agustus 2020 dari <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/indikator-governance-dan-penerapannya-dalam-mewujudkan-demokratisasi-di-indonesia>.

Mahardhika, M. (2018, 8 Desember). Mengukur "Good Governance" dan Kriteria Pemerintah Dikatakan "Good Governance". *Kompasiana*. Diperoleh 30 April 2020 dari <https://www.kompasiana.com/muhammadmahardhika/5c0b41a8aebe17d134a10b7/mengukur-good-governance-dan-kriteria-pemerintah-dikatakan-good-governance>.

Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo, S. L. (2012). *Manajemen Pendidikan Aplikasi dan Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 *Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. 23 Mei 2007. Jakarta.

Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 37-46.

Ramadhan, W. (2016, 30 September). Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi. *Kompasiana*. Diperoleh 29 April 2020 dari https://www.kompasiana.com/wahyudi_ramadhan/57ed64e94d7a611e1fe20dfc/faktor-penyebab-terjadinya-korupsi?page=all.

Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sabandar, S.Y., Tawe, A., & Musa, C.I. (2018). The Implementation of Good University Governance in the Private Universities in Makassar (Indonesia). *Revista ESPACIOS*, 39(2), 1-13.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Sutaryo, Naviantia, I.A., & Muhtar. (2020). Audit Opinion on Government Financial Report: Evidence from Local Governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129-144.

Trisnawati, F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 1-19.